

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM MICRO ENTERPRISES THROUGH TRAINING AND MENTORING

Afmi Apriliani^{1a}, Cecep Wahyudin¹, Arti Hastuti¹, Faisal Tri Ramdani¹, Herli Andani¹, Sosa Sonia Irli¹

¹Universitas Djuanda, Indonesia

^aKorespondensi: Afmi Apriliani, E-mail: afmi.apriliani@unida.ac.id

(Diterima: 01-08-2024; Ditelaah: 11-08-2024; Disetujui: 26-09-2024)

ABSTRACT

Micro, small and medium enterprises can develop if they are supported by the involvement of actors involved from government, MSMEs and the private sector so that all problems such as access to capital and downstream marketing can be resolved. The aim of the service carried out is to increase target knowledge and skills in collaborative governance in the development of micro, small and medium enterprises. The service method used is through training, mentoring and evaluation based on pre-tests and post-tests given to 30 participants, then analysis is carried out based on descriptive quantitative analysis for ranking and averages. The results of the service carried out by MSMEs in Banjarsari Village showed a significant increase in knowledge and skills based on pre-test and post-test measurements. The average increase in knowledge in collaborative governance for the development of MSMEs is 53%, this illustrates that there is success in the service program carried out so that this service has an impact on the development of Banjarsari village MSMEs in the aspects of governance, production and marketing.

Keywords: collaborative governance, community welfare, micro, small and medium enterprises, business actors, chip flavor variants.

ABSTRAK

Pengembangan UMKM pedesaan menjadi target utama Pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal termasuk sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Permasalahannya dalam pengembangan UMKM di Desa Banjarsari adalah masalah manajemen UMKM, keterbatasan akses pemasaran, dan masih terbatasnya inovasi dalam produksi. Pelaku UMKM dapat berkembang jika didukung dengan keterlibatan para aktor yang terlibat dari pemerintahan, pelaku umkm dan sektor swasta sehingga segala permasalahan seperti akses permodalan dan hilirisasi pemasaran dapat terselesaikan. Tujuan pengabdian yang dilakukan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sasaran dalam collaborative governance dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Metode pengabdian yang digunakan melalui pelatihan, pendampingan dan evaluasi berdasarkan pre-test serta post-test yang diberikan kepada 30 peserta, kemudian dilakukan analisa berdasarkan pada analisa kuantitatif deskriptif untuk perbandingan dan rerataan. Hasil pengabdian yang dilakukan kepada para pelaku UMKM di Desa Banjarsari menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pada pengukuran pre-test dan post-test. Rataan peningkatan pengetahuan dalam tatakelola kolaboratif untuk pengembangan UMKM sebesar 53%, hal demikian menggambarkan bahwa adanya keberhasilan dalam program pengabdian yang dilakukan sehingga pengabdian ini berdampak pada pengembangan umkm desa banjarsari dalam aspek tatakelola, produksi dan pemasaran.

Kata kunci: collaborative governance, kesejahteraan masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah, pelaku usaha pelaku usaha, varian rasa kripik.

Apriliani, A., Wahyudin, C., Hastuti, A., Tri Ramdani, F., Andani, H., & Sonia Irlis, S. (2024). Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pelatihan dan Pendampingan. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(3), 275–286. <https://doi.org/10.30997/qh.v10i3.15865>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu aspek yang dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan perekonomian nasional secara mandiri pada seetiap daerah sehingga dapat mewujudkan tujuan negara dalam mencapai kesejahteraan Masyarakat sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 4. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2021, jumlah UMKM kini berjumlah 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia antara lain mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada dan mampu menjangkau hingga 60,4% dari total investasi. Dengan demikian, UMKM berperan aktif dalam peningkatan perekonomian negara.

Selain itu, UMKM juga menjadi salah satu solusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat mengatasi pengangguran-pengangguran yang ada di suatu daerah. Oleh sebab itu, keberadaan UMKM perlu adanya pemberdayaan dalam mewujudkan pengembangan UMKM yang mandiri. kemampuan UMKM dalam menciptakan peluang kerja mengindikasikan bahwa UMKM memiliki potensi yang cukup besar dalam program pemberdayaan masyarakat (Arifqi, 2019; Fatine, 2022). Pemberdayaan masyarakat meliputi pembangunan masyarakat dan pembangunan yang berbasis pada masyarakat (Community based development) yang kemudian mencakup pembangunan berbasis masyarakat yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat (Santoso, 2022). Oleh karena itu, dalam pengembangan UMKM perlu adanya keterlibatan setiap aktor dalam mewujudkan UMKM yang

mandiri dan mampu berdaya saing secara global, sehingga tatakelola UMKM tidak bisa berjalan sendiri-sendiri melainkan harus ada kolaborasi yang baik antara pelaku UMKM, pihak pemerintah dan sektor swasta (Apriliani *et al.*, 2023; Wahyudin *et al.*, 2023; Wahyudin, Firliandoko, *et al.*, 2024).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal, produk yang memiliki prospek besar karena keripik telah menjadi salah satu camilan yang paling disukai di masyarakat. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini, diperlukan langkah-langkah efektif dalam pengembangan UMKM, dimana dimana Collaborative Governance menjadi salah satu kunci strategi.

Collaborative governance Merujuk pada proses di mana berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat bekerja sama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengembangan UMKM, kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha, inovasi, dan keberlanjutan (Prastiwi, 2023).

Dengan demikian, tatakelola kolaboratif dalam pengembangan UMKM menjadi kunci utama dalam keberhasilan UMKM untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu UMKM yang mempunyai potensi pengembangan dan perlu pendampingan yaitu UMKM yang terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Namun dalam hal ini, UMKM tersebut sering mengalami berbagai permasalahan dalam pengembangannya yang ditinjau dari aspek manajemen, produksi dan pemasaran. Permasalahan UMKM yang menyangkut

ketiga aspek tersebut secara umum terjadi pada setiap UMKM lokal atau pedesaan khususnya seperti adanya ketidak tahuan dalam membangun tatakelola UMKM yang baik, adanya keterbatasan dalam akses permodalan sehingga UMKM dapat menghambat aspek produksi dan menyebabkan tidak dapat berkembangnya UMKM serta promosi yang dilakukan terbatas untuk lingkup lokal dan belum menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemasarannya.

Melalui pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh akademisi dengan pendekatan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan UMKM ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan sumber daya, namun juga dapat meningkatkan kemampuan bisnis pada sektor UMKM pedesaan, sehingga mendorong praktik bisnis UMKM berkelanjutan dan dapat terintegrasikan dengan program pendampingan yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan bagi mewujudkan pertumbuhan dan keberhasilan UMKM. Pendampingan yang efektif dapat meningkatkan pengembangan pribadi dan hasil bisnis wirausahawan pemula, menunjukkan bahwa program pendampingan terstruktur dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri dan dinamika kinerja (St-Jean et al., 2018). Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan pada produk keripik merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan keinginan usaha. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM dapat tercipta (Prastiwi, 2023). Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan potensi UMKM, khususnya di sektor produk keripik, untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Keberhasilan kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas produk keripik tetapi juga berkontribusi

pada pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Pendampingan penting dalam memungkinkan wirausahawan mengembangkan bisnis berkelanjutan, sehingga menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Kunaka & Moos, 2019; Reed et al., 2016).

Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan berdasarkan pada kajian tatakelola kolaboratif dalam pengembangan UMKM. Sehingga pengabdian ini mempunyai focus pada peningkatan peran serta masyarakat, khususnya terkait peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pelaku UMKM. Strategi selalu terkait dengan 3 hal, yaitu tujuan, sarana, dan metode. Tujuan terkait dengan tujuan pengembangan UMKM, Sarana terkait dengan sarana dan prasarana UMKM, termasuk tersedianya sarana pendukung seperti sarana pemasaran. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui pelatihan, dan pendampingan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang cara mengembangkan produk UMKM yang telah ada. Dalam konteks ini, kontribusi usaha UMKM kecil dan inovatif sangat signifikan. Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan umkm Desa Banjarsari melalui pendekatan collaborative governance sehingga dapat meningkatkan aspek produksi, pemasaran dan pengelolaan umkm menjadi lebih berkembang.

MATERI DAN METODE

Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan para pelaku UMKM di Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam aspek manajemen, produksi dan pemasaran melalui kajian collaborative governance dalam pengembangan UMKM.

Konsep *Collaborative governance* merupakan keterlibatan secara aktif dari berbagai pihak seperti pemberdayaan para pelaku umkm melibatkan keterlibatan aktor-aktor yang berkepentingan meliputi aktor pemerintah yang berperan sebagai pengaturan regulasi dalam membangun jejaring, masyarakat setempat dapat berperan sebagai pelaku umkm yang diberdayakan serta sektor swasta yang dapat mendukung dalam permodalan umkm maupun jaringan pengelola umkm. Dengan demikian, konsep collaborative governance dapat diterapkan dalam pemberdayaan umkm, sehingga umkm yang diberdayakan dapat berkembang dengan adanya bantuan dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (Apriliani et al., 2018; Arrozaaq, 2016).

Metode pengabdian yang digunakan sebagai salah satu cara dalam melakukan analisa pengembangan umkm di Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dengan kajian konsep collaborative governance. Dalam melakukan analisa UMKM maka dilakukan observasi atau survey terlebih dahulu untuk mengidentifikasi Fenomena yang terjadi dalam pengembangan umkm, selanjutnya dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada 30 responden dalam rangka pemberian pemahaman dan keterampilan para pelaku usaha melalui kajian collaborative governance untuk pemberdayaan UMKM menjadi lebih berkembang lagi. Tahap selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dengan pemberian pre-test dan post-test kepada 30 responden, pemberian pre-test dan post-test ini selain untuk evaluasi tetapi juga sebagai metode yang digunakan untuk pengumpulan data, adapun isi dari pre-test dan post-test berdasarkan pada 5 indikator mengenai pemahaman konsep collaborative governance. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah ke dalam bentuk persentase dengan tujuan untuk lebih memudahkan dalam mengetahui tingkat pemahaman dan keterampilan yang diberikan apakah terdapat peningkatan

sehingga pengabdian yang dilakukan dapat dikatakan berhasil jika umkm yang diberdayakan terdapat pengembangan dari segi manajemen, produksi hingga pemasaran. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk tabel dengan dua sisi kolom, kolom sisi kiri data pre-test dan kolom sisi kanan data post-test dengan begitu lebih memudahkan untuk melihat hasil kenaikan persentase pre-test ke post-test. Hasil pre-test dan post-test dilakukan analisa berdasarkan pada analisa statistik deskriptif (Fitriah et al., 2022; Pratiidina et al., 2022; Wahyudin et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan pelatihan dan pendampingan para pelaku UMKM dalam mengembangkan produk yang dimilikinya. Pelatihan *Collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dilakukan dalam rangka menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pelaku UMKM dalam mengembangkan UMKM yang dilihat dari segi tatakelola, produksi dan pemasarannya. Adapun pelatihan yang dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi kepada para pelaku umkm untuk pengembangan UMKM melalui konsep collaborative governance dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pada lima indikator.

Indikator 1

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa edukasi yang dilakukan kepada para pelaku umkm meliputi edukasi terhadap pemahaman para pelaku usaha terhadap pengertian umkm. Hasil analisa pre-test menunjukkan sebelum dilaksanakannya program pengabdian maka dapat diketahui mayoritas pelaku usaha

belum mengetahui sepenuhnya dengan pengertian umkm yaitu sebanyak 66,7% dan hanya 33,3% sebagai minoritas peserta pelatihan yang dapat memahami dalam pengertian umkm. Namun setelah dilaksanakan program pengabdian, berdasarkan hasil analisa post-test terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha mengenai umkm yang dimana terdapat 93,3% mayoritas pengetahuan dan pemahaman peserta meningkat dan minoritas peserta sebesar 6,7% memerlukan edukasi lebih lanjut. Dalam artian tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap pengetahuan dalam pengertian umkm meningkat sebesar **60%**, dengan kata lain program pengabdian yang dilakukan terdapat keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku umkm.

Tabel 1. Singkatan UMKM

NO	JAWABAN	Pre-Test		Post-Test	
		F	%	F	%
A	Usaha Masyarakat Kecil Menengah	20	66,7	2	6,7
B	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	10	33,3	28	93,3
C	Usaha Menengah Kecil	0	0	0	0
D	Usaha Mandiri Kecil Menengah	0	20	0	0
	Jumlah	30	100%	30	100%

Pada penelitian yang dilakukan (Audina, 2021) "Peranan Pelatihan Terhadap Pengembangan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Deli Serdang" Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang kini sudah cukup baik, itu semua dapat dilihat dari makin banyaknya anggota usaha kecil dan menengah yang

menjadi pembinaan Dinas koperasi. Hal ini telah sesuai dimana pada mayoritas pengetahuan dan pemahaman peserta meningkat setelah dilakukannya pelatihan.

Pengetahuan mengenai pengertian umkm menjadi pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pelaku umkm, karena pada dasarnya dengan mengetahui pengetahuan dasar maka dapat dikatakan bahwa para pelaku usaha dapat memposisikan dirinya sebagai umkm yang dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai lintas sektor untuk pengembangan usaha-usaha mereka dengan melibatkan para aktor.

Indikator 2

Tabel 2. Jumlah UMKM di Indonesia

NO	JAWABAN	Pre-Test		Post-Test	
		F	%	F	%
A	60 juta	2	6,7	0	0
B	64,19 juta	11	36,7	24	80
C	70 juta	9	30	3	10
D	75 juta	8	26,6	3	10
	Jumlah	30	100%	30	100%

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa edukasi yang dilakukan kepada para pelaku umkm meliputi edukasi terhadap pemahaman para pelaku usaha terhadap pengetahuan jumlah umkm saat ini di Indonesia. Hasil analisa pre-test menunjukkan sebelum dilaksanakannya program pengabdian maka dapat diketahui mayoritas pelaku usaha belum mengetahui sepenuhnya dengan jumlah umkm yang ada di Indonesia saat ini, yaitu sebesar 26,6% dan hanya 36,7% sebagai minoritas peserta pelatihan yang dapat mengetahui jumlah umkm di Indonesia saat ini. Namun setelah dilaksanakan program pengabdian, berdasarkan hasil analisa post-test terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha mengenai jumlah umkm di Indonesia saat ini yaitu terdapat 80% dan minoritas peserta sebesar 20% masih memerlukan edukasi lebih lanjut. Dalam artian, tingkat pemahaman peserta

pelatihan terhadap pengetahuan dalam mengetahui jumlah umkm di Indonesia saat ini meningkat sebesar **43,3%**, dengan kata lain program pengabdian yang dilakukan terdapat keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku umkm.

Pada penelitian yang dilakukan (Harahap et al., 2020) dengan judul "*Tujuan Defisit fiskal, Ekspor, Impor dan Jumlah UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain defisit fiskal dan impor, jumlah UMKM ternyata memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi peranan UMKM yang menunjukkan kemandirian suatu negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Pengetahuan mengenai jumlah umkm di Indonesia saat ini menjadi salah satu landasan dasar bagi para pelaku usaha untuk saling berkolaborasi dengan sesama pelaku umkm sehingga dapat memudahkan para pelaku usaha dalam mengembangkan umkm karena terdapat jejaring yang dapat saling menguntungkan dan memudahkan para pelaku umkm dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari segi tatakelola, produksi maupun dalam pemasaran produk.

Indikator 3

Berdasarkan pada tabel 3 dapat diketahui bahwa edukasi yang dilakukan kepada para pelaku umkm meliputi edukasi terhadap pemahaman para pelaku usaha terhadap unsur utama konsep collaborative governance. Hasil analisa pre-test menunjukkan sebelum dilaksanakannya program pengabdian maka dapat diketahui mayoritas pelaku usaha belum mengetahui sepenuhnya dengan unsur-unsur collaborative governance yang dapat membantu dalam pengembangan umkm yaitu sebesar 66,6% dan minoritas peserta sebesar 33,4% dapat memahami dalam keterlibatan unsur-unsur yang dapat

membantu dalam pengembangan umkm. Namun setelah dilaksanakan program pengabdian, berdasarkan hasil analisa post-test terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha mengenai unsur-unsur collaborative governance yang dapat membantu dalam pengembangan umkm yaitu sebesar 70% dan minoritas peserta sebesar 30% masih memerlukan edukasi lebih lanjut. Dalam artian, tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap pengetahuan dalam mengetahui keterlibatan unsur pemerintah, masyarakat dan sektor swasta melalui konsep collaborative governance dapat menjadi faktor pendukung pengembangan umkm dengan peningkatan sebesar **36,6%**, dengan kata lain program pengabdian yang dilakukan terdapat keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku umkm.

Tabel 3. Tiga Unsur Utama Konsep Collaborative Governance

NO	JAWABAN	Pre-Test		Post-Test	
		F	%	F	%
A	Pemerintah, Masyarakat dan Media Sosial	16	53,3	6	20
B	Pemerintah, Media dan Masyarakat	4	13,3	3	10
C	Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	10	33,4	21	70
D	Pemerintah, Akademisi dan Pengusaha	0	0	0	0
	Jumlah	30	100%	30	100%

Penelitian yang dilakukan (Faidati & Muthmainah, 2019) dengan judul "*Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM di Era revolusi Industri*" menunjukkan bahwa Collaborative governance dalam pengembangan UMKM di DIY pada era

revolusi industri 4.0 merupakan strategi bersama untuk meningkatkan daya saing UMKM. Kolaborasi ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, asosiasi pengusaha, serta organisasi seperti Google dan platform e-commerce. Namun, implementasi collaborative governance ini belum optimal. Terdapat tumpang tindih program dan kelompok sasaran, serta kurangnya data yang memadai dari stakeholder maupun pemerintah. Beberapa komunitas UMKM menerima banyak program, sementara yang lain belum terjangkau. Selain itu, belum ada forum koordinasi antar stakeholder yang efektif, meskipun komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan tugasnya sudah baik. Proses kerjasama antar stakeholder masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pengetahuan mengenai keterlibatan tiga unsur collaborative governance menjadi langkah awal dari para pelaku umkm dengan siapa mereka harus bermitra dalam pengembangan umkm, sehingga dengan adanya pengetahuan ini dapat membuka jalan kepada para pelaku umkm untuk melakukan mitra kerjasama dalam pengembangan usaha-usaha mereka.

Indikator 4

Tabel 4. Bentuk usaha untuk mengembangkan UMKM

NO	JAWABAN	Pre-Test		Post-Test	
		F	%	F	%
A	Kemitraan	14	46,7	29	96,7
B	Pengurangan Biaya roduksi	5	16,7	1	3,3
C	Penutupan Usaha	0	0	0	0
D	Penambahan Tenaga Kerja	11	36,6	0	0
	Jumlah	30	100%	30	100%

Berdasarkan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa edukasi yang dilakukan kepada para pelaku umkm meliputi edukasi terhadap pemahaman para pelaku usaha terhadap bentuk usaha untuk mengembangkan UMKM. Hasil analisa pre-test menunjukkan sebelum dilaksanakannya program pengabdian maka dapat diketahui mayoritas pelaku usaha belum mengetahui sepenuhnya dengan bentuk usaha untuk mengembangkan UMKM yaitu sebesar 53,3% dan hanya 46,7% minoritas peserta dapat memahami dalam keterlibatan kemitraan sebagai bentuk usaha untuk mengembangkan UMKM. Namun setelah dilaksanakan program pengabdian, berdasarkan hasil analisa post-test terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha mengenai keterlibatan kemitraan sebagai bentuk usaha untuk mengembangkan UMKM yaitu sebesar 96,7% dan hanya 3,3% sebagai minoritas peserta pelatihan masih memerlukan edukasi lebih lanjut. Dalam artian, tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap pengetahuan dalam mengetahui keterlibatan kemitraan sebagai bentuk usaha untuk mengembangkan UMKM dengan peningkatan sebesar 50%, dengan kata lain program pengabdian yang dilakukan terdapat keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku umkm.

Pada penelitian yang dilakukan (Hasanah et al., 2022) dengan judul "Perbandingan model Pola Pengembangan dan Strategi Kemitraan UMKM Danau Siombak" menunjukkan bahwa pola kemitraan di Danau Siombak saat ini menggunakan konsinyasi dan keagenan. Usulan model kemitraan merekomendasikan pemerintah sebagai pengawas yang memberikan kebijakan dan informasi. BUMN, lembaga keuangan, dan usaha besar berperan sebagai penyedia modal dan penghubung kemitraan. Model ini sebaiknya fokus pada pengembangan kemitraan yang profesional dan mandiri. Dianjurkan untuk mengubah pola kemitraan

yang ada menuju model baru yang mendukung kemajuan UMKM secara bersama (win-win solution). Implementasi pola ini perlu didukung oleh stakeholder dan manajemen yang baik, dengan pendekatan top down dan top up, menciptakan hubungan mutualisme dengan pemerintah sebagai pengawas.

Pengetahuan mengenai kemitraan sebagai bentuk usaha untuk mengembangkan umkm sangat diperlukan, karena dengan memahami konsep bermitra maka para pelaku usaha dapat melakukan mitra sesuai dengan kebutuhannya seperti dalam aspek produksi untuk penyediaan permodalan dan pengadaan barang maupun pada aspek tatakelola dan pemasaran melalui peran jasa.

Indikator 5

Tabel 5. Peran Pemerintah dalam Proses Pelaksanaan Kemitraan

NO	JAWABAN	Pre-Test		Post-Test	
		F	%	F	%
A	Menyediakan Dana Untuk Semua Usaha	23	76,7	4	13,3
B	Membuat kebijakan yang Tidak Sesuai dengan Kebutuhan UMKM	0	0	0	0
C	Menyediakan Data dan Informasi Pelaku Usaha UMKM yang Siap Bermitra	7	23,3	26	86,7
D	Mengawasi semua produk impor	0	0	0	0
	Jumlah	30	100%	30	100%

Berdasarkan pada tabel 5 dapat diketahui bahwa edukasi yang dilakukan kepada para pelaku umkm meliputi edukasi terhadap pemahaman para pelaku usaha terhadap peran pemerintah dalam proses pelaksanaan kemitraaan. Hasil analisa pre-test menunjukkan sebelum dilaksanakannya program pengabdian maka dapat diketahui mayoritas pelaku usaha belum mengetahui sepenuhnya dengan peran pemerintah dalam proses pelaksanaan kemitraaan yaitu sebesar 76,7% dan hanya 23,3% minoritas peserta dapat memahami dalam peran pemerintah dalam proses pelaksanaan kemitraaan. Namun setelah dilaksanakan program pengabdian, berdasarkan hasil analisa post-test terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha mengenai peran pemerintah dalam proses pelaksanaan kemitraaan yaitu sebesar 86,7% dan hanya 13,3% sebagai minoritas peserta pelatihan masih memerlukan edukasi lebih lanjut. Dalam artian, tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap pengetahuan dalam mengetahui peran pemerintah dalam proses pelaksanaan kemitraaan dengan peningkatan sebesar **63,4%**, dengan kata lain program pengabdian yang dilakukan terdapat keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku umkm.

Pengetahuan para pelaku usaha terhadap peran pemerintah dalam proses pelaksanaan kemitraan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan umkm untuk mendapatkan mitra yang dapat menjadi akses bantuan permodalan, pengadaan barang dan jasa maupun pemasaran dalam mengembangkan umkm yang dikelola.

Tabel 6. Rekapitulasi Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM

No	JAWABAN	Pre - Test		Post - Test	
		F	%	F	%
1	Singkatan UMKM	10	33,3	28	93,3
2	Jumlah UMKM di Indonesia	11	36,7	24	80
3	Tiga Unsur Utama Konsep Collaborative Governance	10	33,3	21	70
4	bentuk usaha untuk mengembangkan UMKM	14	46,7	29	96,7
5	Peran Pemerintah Dalam Proses Pelaksanaan Kemitraan	7	23,3	26	86,7

Rata-Rata	10	32,7%	26	85,7%
-----------	----	-------	----	-------

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa edukasi yang dilakukan kepada para pelaku umkm dengan memberikan pemahaman terhadap collaborative governance dalam pengembangan UMKM di Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan secara signifikan yaitu dengan rata-rata peningkatan pengetahuan sebesar 53%. Adapun peningkatan pengetahuan dengan nilai tertinggi yaitu pada indikator Peran pemerintah dalam proses pelaksanaan kemitraan yaitu rata-rata peningkatan sebesar 63,4% dan peningkatan pengetahuan terendah berada pada indikator unsur utama konsep collaborative governance yaitu rata-rata peningkatan sebesar 36,6%. Sedangkan untuk indikator pengetahuan dalam pengertian umkm terdapat peningkatan pengetahuan rata-rata sebesar 60%, indikator pengetahuan dalam jumlah umkm di Indonesia saat ini terdapat peningkatan pengetahuan rata-rata sebesar 43,3% dan indikator bentuk usaha untuk mengembangkan umkm terdapat peningkatan pengetahuan rata-rata sebesar 50%.

Pada penelitian yang dilakukan (Sari et al., 2024) "*Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Collaborative Governance di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu*" Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pembinaan UMKM, pelaku usaha menerima materi terkait bagaimana pengembangan suatu usaha. Hal ini telah sesuai dengan pengabdian yang dilakukan dimana adanya peningkatan pengetahuan secara signifikan setelah dilakukan pendampingan dan pelatihan.

Sementara kegiatan pendampingan dilakukan kepada mitra umkm dalam pembuatan produksi kripik singkong dan pisang dengan bentuk varian rasa. Pendampingan pengabdian menghasilkan peningkatan produksi kripik singkong dan kripik pisang, kemudian dalam

pendampingan juga diterapkan bagaimana cara memasarkan produk kripik singkong dengan varian rasa dapat di jual dengan teknik pemasaran digital marketing. Pemasaran digital marketing pada saat ini menjadi opsi yang paling diminati oleh setiap orang dalam memasarkan produk karena menyesuaikan dengan penggunaan teknologi informasi yang tidak membatasi pembelian sehingga penjualan yang dilakukan dapat meningkat pesat karena adanya pembeli secara global (Cahya et al., 2021; Christina et al., 2019; Goldfarb & Tucker, 2019).

Adapun kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu dengan teknik pemotongan, pengolahan dan penyajian kripik singkong dan pisang. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pendampingan pengembangan umkm dalam pemotongan, pengolahan dan penyajian, diantaranya:



Gambar 1. Pemotongan singkong dan pisang



Gambar 2. Pengolaha Kripik Varian Rasa

Berdasarkan gambar 1 & 2 dilakukan pendampingan pemotongan serta pengolahan singkong dan pisang dilakukan secara bersama-sama oleh tim pengabdian

dan mitra pengabdian pelaku umkm desa banjarsari.



Gambar 3. Varian Rasa Kripik Singkong dan Pisang

Adapun varian rasa kripik singkong dan kripik pisang meliputi varian rasa:

1. Kripik singkong original dan balado
2. Kripik pisang varian original, coklat, strawberry, green tea dan vanilla

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan melalui pelatihan collaborative governance dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang diukur dengan lima indikator utama sebagai tolak ukur untuk mengetahui pengetahuan para pelaku usaha dengan hasil evaluasi berdasarkan pre-test dan post-test dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dari program pengabdian yang dilakukan yaitu dengan rata-rata peningkatan pengetahuan sebesar 53% dari total 30 peserta, yang dimana rata-rata sebelum dilaksanakan pengabdian tingkat pengetahuan para pelaku umkm hanya sebesar 32,7% dan setelah dilaksanakan pengabdian maka dapat diketahui rata-rata peningkatan pengetahuan meningkat menjadi 85,7% pada pelaku umkm di Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dan

mendukung dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan sehingga program kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar dan berhasil meningkatkan pengetahuan para pelaku umkm di Desa Banjarsari. Adapun ucapan terimakasih kami khususkan kepada Universitas Djuanda, Desa Banjarsari, mitra UMKM Desa Banjarsari dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendanai Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat tahun 2024 melalui Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat dengan Ruang Lingkup Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, A., Ramdani, F. T., Fitria, M., Wahyudin, C., Assayuti, M., Jalaludin, Zulfa, A. A., Munawaroh, E., & Aryati, S. (2023). Cultural Reserve Edu-Tourism Governance. *Jurnal Qardhul Hasan; Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(3), 227–235.
- Apriliani, A., Rita, R., & Azahari, R. (2018). Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengembangan Wisata Geopark Ciletuh-Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. *Administratie Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 30–38.
- Arifqi, Moh. M. (2019). Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra). *Al-Tijary*, 4(2), 125–138. <https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1356>
- Arrozaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13.
- Audina, S. H. (2021). Peranan Pelatihan Terhadap Pengembangan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Bisnis Corporate: Vol. 6 No. 1.*

- <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jubisco/article/view/1486>
- Cahya, A. D., Aqdella, F. A., Jannah, A. Z., & Setyawati, H. (2021). Memanfaatkan Marketplace Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Penjualan Di Tengah Pandemi Covid-19. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(3), 503–510. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i3.329>
- Christina, I. D., Fenny, & Roselina, D. (2019). Digital Marketing Strategy In Promoting Product. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 4(10), 58–66.
- Faidati, N., & Muthmainah, N. F. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 8.0*, 3(1), 1–6.
- Fatine, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Kota Dibidang Ekonomi Melalui Umkm Ladu Arai Pinang Di Lubuk Buaya Kota Padang. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 78–83. <https://doi.org/10.34312/ljpmt.v1i2.15346>
- Fitriah, M., Pratidina, G., Encep, M., Hasbiyah, D., Ruhimat, Apriliyani, N. V., Wahyudin, C., Agustini, Khaira, M., Ramadhan, D. A., Sakinah, S., Fadilah, A., Agustiani, T., & Ramadhan, R. N. (2022). *Peningkatan Pengetahuan Danketerampilan Pemanfaatan Media Sosial Untuk Branding Desa Wisata*. 8(2), 1–7.
- Goldfarb, A., & Tucker, C. (2019). Digital marketing. In *Handbook of the Economics of Marketing, Volume 1* (Vol. 1). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/bs.hem.2019.04.004>
- Harahap, E. F., Luviana, L., & Huda, N. (2020). TINJAUAN DEFISIT FISKAL, EKSPOR, IMPOR DAN JUMLAH UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Benefita*, 5(2), 151–161. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.4907>
- Hasanah, U., Faried, A. I., & Sembiring, R. (2022). Perbandingan Model Pola Pengembangan dan Strategi Kemitraan UMKM Danau Siombak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 2579–2588. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5847>
- Kunaka, C., & Moos, M. N. (2019). Evaluating mentoring outcomes from the perspective of entrepreneurs and small business owners. *The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.4102/sajesbm.v11i1.214>
- Prastiwi, R., & Ahdiyana, M. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Emping Singkong Di Kalurahan Ringinharjo. *Journal of Public Policy and Administration Research Volume 01, 02*. <https://journal.student.uny.ac.id/joppar/article/download/20694/18828>
- Pratidina, G., Wahyudin, C., Apriliyani, N. V., & Amalia, N. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Desa Wisata. *Jurnal Qardhul Hasan*, 8(2), 34–41.
- Reed, E., Gam, H. J., & Banning, J. (2016). Challenges and Benefits of Made in the USA Manufacturing: A Study of Small Business Owners. *International Textile and Apparel Association, Inc. ALL RIGHTS RESERVED ITAA Proceedings*, 73.
- Santoso, A. A. P. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA WISATA DI KELURAHAN KANDRI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 33–48. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2930>
- Sari, S., Suarning, Bahri., A Zubai., K. M & Muhammadun, M (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Collaborative Governance di Desa

Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7010/1/2120203860102046%20SEFRYANA%20SARI.pdf>

St-Jean, E., Radu-Lefebvre, M., & Mathieu, C. (2018). Can less be more? Mentoring functions, learning goal orientation, and novice entrepreneurs' self-efficacy. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 24(1), 2–21. <https://doi.org/10.1108/IJEER-09-2016-0299>

Wahyudin, C., Firliandoko, R., Amalia, N., Zulfa, A. A., Studi, P., Publik, A., Djuanda, U., Tol, J., No, C., Barat, J., Cecep, K., & Email, W. (2024). *Collaborative Based Tourism Governance Model In Sustainable Tourism Development*. 10, 147–164.

Wahyudin, C., Salbiah, E., Afriant, N., & Aprianto, F. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Logam. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1325–1334.

Wahyudin, C., Subagdja, O., & Iskandar, A. (2023). Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. *Jurnal Governansi*, 9(2), 151–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.8004>